

MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA DAN KARAKTER KEKINDONESIAAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ISU GLOBAL MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Anif Istianah^{1*}, Kokom Komalasari²

*anif.istianah88@upi.edu

ARTICLE INFO

Article history:

Received: December 28, 2022

Accepted: February 08, 2023

Published: March 28, 2023

Keywords:

Character Keindonesiaan; Civics;

Globalization

ABSTRACT

The main goal of global citizenship education is to prepare young people to understand the contemporary world, play an active role in solving national and global problems, and make an active contribution to the world. an inclusive society and a safe environment. and a sustainable world. In the Indonesian context, citizenship education does not include global citizenship education material. Therefore, a conceptual framework for global citizenship skills is needed in the development of a civics education curriculum. This conceptual framework must include three key elements, namely global knowledge and understanding, values and attitudes, and global skills in the global era. Playing an important role in strengthening the identity and character of the Indonesian nation in the era of globalization. The phenomenon of globalization has become a rampant issue and program affecting the dynamics of global society. Although the role of Civics in the structure of the national education program has experienced ups and downs, the importance of Civics in strengthening the identity and character of the Indonesian nation in the era of globalization cannot be ignored. Repositioning civics education as a values-based educational discipline and building multidimensional citizenship. This approach is supported by assumptions and facts that show the need to adopt this approach.

ABSTRAK

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan global adalah mempersiapkan generasi muda untuk memahami dunia kontemporer, berperan aktif dalam memecahkan masalah nasional dan global, serta memberikan kontribusi aktif bagi dunia. masyarakat inklusif dan lingkungan yang aman. dan dunia yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan tidak memasukkan materi pendidikan kewarganegaraan global. Oleh karena itu, diperlukan kerangka konseptual keterampilan kewarganegaraan global dalam pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Kerangka konseptual ini harus mencakup tiga elemen kunci, yaitu pengetahuan dan pemahaman global, nilai dan sikap, dan keterampilan mendunia di era global. Berperan penting dalam memperkuat jati diri dan karakter bangsa Indonesia di era globalisasi.

Fenomena globalisasi telah menjadi isu dan program yang merajalela mempengaruhi dinamika masyarakat global. Meskipun peran PKN dalam struktur program pendidikan nasional mengalami pasang surut, namun pentingnya PKN dalam penguatan jati diri dan karakter bangsa Indonesia di era globalisasi tidak dapat diabaikan. Reposisi pendidikan kewarganegaraan sebagai disiplin pendidikan berbasis nilai dan membangun kewarganegaraan yang multidimensi. Pendekatan ini didukung oleh asumsi dan fakta yang menunjukkan perlunya mengadopsi pendekatan ini.

Corresponding Author:

Anif Istianah

anif.istianah88@upi.edu

PENDAHULUAN

Tantangan dan perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional di berbagai bidang kehidupan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, eskalasi pasar bebas antar bangsa dan antar bangsa, suasana yang semakin kompetitif, kerasnya segala bidang kehidupan, serta demokratisasi dan masalah kemanusiaan sains. Hak asasi manusia, merupakan tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia untuk terus hidup dan bertahan dalam kancah kehidupan global. Di era globalisasi, tidak ada orang atau negara di dunia yang dapat menyembunyikan atau melindungi diri dari pengaruh globalisasi. Globalisasi dimaknai sebagai munculnya budaya *hibrid*, berasal dari dan didominasi oleh budaya asing, sehingga menimbulkan krisis budaya lokal dan nasional. Budaya *hibrida* juga menyebabkan hilangnya identitas budaya nasional dan lokal, yang sangat penting bagi integrasi sosial, budaya, dan politik masyarakat dan negara-bangsa (Azra, 2001: 150-151).

Istilah globalisasi: tampaknya tidak dalam konteks diskusi baru-baru ini. Pertama-tama kita harus memahami arti dari globalisasi untuk membuatnya lebih jelas, seperti yang dikatakan Lubers (dalam Wilson, 2008: 1), *globalisation is a process "that widens the extent and form of cross-border transactions among people"s assets, goods, and services, and that deepens the economic interdependence between and among globalizing entities, which may be private or public institutions or governments.*

Globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi merupakan trend yang berkembang sangat pesat di dunia saat ini. Pergeseran paradigma saat ini perlu disikapi secara arif dan bijak dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Namun, kondisi ini juga berimplikasi luas pada banyak sektor lain, termasuk dunia pendidikan sebagai elemen jasa yang menghasilkan human capital. Manusia sebagai warga dunia tidak dapat menyangkal dan menghindari permasalahan globalisasi di era informasi. Kesamaanlah yang menciptakan motivasi hidup dengan orang-orang di dunia. Tentunya untuk menghadapinya diperlukan banyak persiapan, sarana dan prasarana, terutama dalam dunia pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar, pengembangan nilai-nilai kepribadian dilakukan melalui pendekatan terpadu pada semua mata pelajaran (*integrated approach*). Khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan politik,

karena misinya adalah mengembangkan nilai dan sikap, maka pengembangan nilai/karakteristik tertentu diprioritaskan, agar dapat menggunakan strategi/metode pendidikan yang berbeda untuk nilai/karakteristik tersebut dikembangkan sebagai efek pedagogik dan juga sebagai efek pendamping dua objek (*feeder effect*) (Budimansyah, 2010: 58).

Berbagai masalah global adalah yang juga diselesaikan oleh warga dunia. Munculnya era global sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rasmayati & Djuwendah, 2015). Masalah atau konflik sosial budaya sangat kompleks di era globalisasi saat ini dan beberapa masalah mendasar yang muncul antara lain konflik politik, individu, kelompok sosial, agama dan internasional (Indrijati et al., 2016). Tentunya dibutuhkan solusi dan perdamaian melalui pendekatan budaya, menerapkan kearifan lokal kepada masyarakat (Syukri, 2019). Permasalahan era global yang muncul harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, agar tidak mengganggu kesejahteraan warga negara. Di era globalisasi akuntabilitas siswa dapat dikembangkan dengan dua cara, baik dengan pendekatan kepada siswa maupun memperkenalkan metode pembelajaran yang dapat membantu mengembangkan akuntabilitas yaitu dengan menggunakan aturan-aturan yang tegas di dalam kelas selama proses pembelajaran. sehingga siswa dapat belajar untuk melawan aturan yang diberlakukan oleh guru dan sekolah.

Pembelajaran yang belum atau belum menerapkan disiplin belajar sosial di kelas. Guru PKn memahami bahwa peran mereka tidak hanya memberikan materi, tetapi juga membimbing dan mendorong perilaku siswa yang lebih baik. Kepemimpinan dan pengembangan karakter siswa pada hakekatnya adalah upaya yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dengan mengendalikan kepribadian dan mengembangkannya ke arah yang lebih positif. Selain itu, guru PKn menjelaskan solusi apa yang dapat dikembangkan untuk pengembangan karakter yang sukses untuk pekerjaan rumah siswa dengan bantuan lingkungan belajar yang digunakan. Penggunaan media canggih dalam pembelajaran di kelas merupakan salah satu dampak globalisasi dalam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi telah mempermudah pekerjaan manusia terutama dalam hal akses informasi. Internet kini telah menjadi kebutuhan tersendiri. Dengan bantuan internet, masyarakat dapat memperoleh informasi dalam waktu yang sangat singkat. Informasi yang Anda cari tidak terbatas pada negara tetapi dapat diperoleh di seluruh dunia melalui Internet. Tentunya hal ini sangat memudahkan siswa untuk mendapatkan materi pembelajaran di luar buku dan penjelasan guru. Hal ini sesuai dengan Firman (2009):95) bahwa perubahan model pembelajaran dan perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan peran yang harus dilakukan guru dalam hubungannya dengan siswa selama proses pembelajaran, guru harus memahami dan mengetahui arah yang tepat dari siswa. Arah pengembangan bagi guru dalam memilih metode mengajar tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi guru sudah lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode ceramah dipadukan dengan diskusi dan pemecahan masalah. dikembangkan menggunakan pengaruh positif yang dibawa oleh era globalisasi.

Peradaban dan budaya adalah semacam pemahaman tentang sistem pola perilaku yang harus berkembang era modern. Modernisasi dan era globalisasi merupakan dua aspek berharga peradaban yang harus diperhatikan dalam rangka mempersiapkan warga negara memasuki era globalisasi, yaitu era menggantikan modernisasi dalam (Albrow, 1996). Era global harus didekati penataan konsep kewarganegaraan global. Warga negara memainkan peran penting dalam proses mewujudkan kedaulatan universal umat manusia. Warga negara memiliki ikatan yang sama dengan warga global, yaitu kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya (Falk & Steenbergen, 1994). Warga suatu negara pada umumnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga dunia. Tentu saja, banyak masalah global yang muncul saat ini berasal dari lemahnya peran warga negara muda dalam memahami hakikat kewarganegaraan global, terutama dalam pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan di sekolah, bahkan universitas (Murdiono, 2014). Hal ini juga didukung dengan semakin meluasnya diseminasi teknologi dan informasi kepada masyarakat. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan akses tidak terbatas dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dan gagasan antara warga dan pemerintah (Kim, Kavanaugh & Hault, 2011).

Perkembangan di era globalisasi abad ke-21 telah mengubah dunia secara cepat. Perubahan menyebabkan berbagai masalah yang tidak hanya mempengaruhi satu negara tetapi menjadi masalah di berbagai negara. Sebuah studi oleh Karsten et al. (1998): 94) menemukan setidaknya 19 tren global yang harus diprediksi oleh setiap negara. Tujuh di antaranya diidentifikasi sebagai tren yang berpotensi tidak diinginkan. Kewarganegaraan diterjemahkan menjadi kewarganegaraan global, yang dapat dipahami sebagai konstruksi multidimensi yang bergantung pada aspek tanggung jawab sosial, kompetensi global, dan partisipasi warga global yang saling terkait (Morais dan Ogden, 2011: 449).

Tren global saat ini perlu diprioritaskan dan menuntut setiap negara di dunia menghadapi masalah global yang berbeda pada paruh pertama abad kedua puluh satu yang perlu ditanggapi dengan serius. Cogan (1998:7) menekankan bahwa negara-negara di dunia menghadapi setidaknya tiga masalah global utama. Ketiga isu tersebut adalah: (1) perkembangan ekonomi global; (2) perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat; dan (3) pertumbuhan populasi global menyebabkan masalah lingkungan. Pandangan serupa diungkapkan oleh Tito (1999:133), yang berpendapat bahwa dunia menjadi semakin kompleks dan saling berhubungan. Beberapa masalah transnasional berasal dari kompleksitas ini, seperti pengabaian dan pengendalian senjata nuklir, pencemaran lingkungan global, dan munculnya kekuatan ekonomi global secara online. Permasalahan global internasional yang timbul akibat gempuran globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi membutuhkan solusi melalui pendekatan baru PKn.

Charles Titus menyebut pendidikan politik sebagai pendekatan baru terhadap pemahaman global, terutama berupa cara pandang dan komitmen baru terhadap pendidikan politik. Pendekatan ini telah diuji oleh Boulding (Titus, 1999:131-132) di Benua Amerika dengan kesimpulan bahwa Amerika akan mengakui planet yang berpenghuni akan menjadi desa Buwana (global village). Situasi seperti itu membutuhkan

perhatian dan tindakan sipil di tingkat transnasional dan transkultural. Dengan demikian, jelaslah bahwa diperlukan cara baru dalam memandang perkembangan budaya yang oleh Boulding (1988) disebut sebagai “budaya kewarganegaraan global” atau yang sekarang lazim disebut “masyarakat sipil abadi” diperlukan (1999:130). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun visi global warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan tidak terbatas pada mempelajari hak dan kewajiban kewarganegaraan tetapi lebih luas dan mendalam mencakup perkembangan warga negara untuk menjadi warga dunia. Pendidikan kewarganegaraan mendidik siswa tentang isu-isu global, budaya, institusi dan sistem internasional dan merupakan pendekatan minimalis yang hanya dapat dilakukan di dalam kelas. Osler dan Starkey (Bourke et al., 2012:163) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan mencerminkan pendekatan maksimal untuk memastikan bahwa siswa siap untuk mengambil peran warga global yang matang dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan agar warga negara muda memiliki pemahaman global. Bank (2008:135) berpendapat bahwa perlu diciptakan konsep baru pendidikan kewarganegaraan di abad 21 agar siswa dapat dididik secara efektif untuk menjadi warga negara yang aktif. Agar transisi berhasil, pengetahuan yang mendasari konsep harus berpindah dari pengetahuan akademis konvensional ke pengetahuan akademis transformatif. Pengetahuan tradisional memperkuat pengetahuan tradisional dan ilmu sosial, serta sikap dan pengetahuan yang dilembagakan dalam budaya populer di sekolah dan perguruan tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan teori grounded. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada hakikat realitas sosial yang dibangun dari kondisi nyata. Peneliti dan peneliti menjaga hubungan yang sangat erat (Denzin dan Lincoln, 2005:10; Flick dkk., 2004:3). Penelitian kualitatif juga biasa disebut dengan penelitian naturalistik. Karena kondisi dalam bidang studi bersifat alamiah atau rasional karena tidak dimanipulasi atau diatur oleh eksperimen atau eksperimen (Denzin dan Lincoln, 2005:3; Negara, 1988:18). Dengan demikian, informasi yang diperoleh merupakan suatu *real case fact* mengenai nilai-nilai fundamental yang harus dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan dalam rangka membangun visi global bagi warga negara muda. Penggunaan pendekatan teoritis dasar dalam penelitian ini berangkat dari fakta bahwa literatur bersifat deskriptif, untuk tujuan menggambarkan realitas, dan untuk menemukan teori-teori yang dibangun dari data. Peneliti dengan pendekatan ini berharap teori yang ditemukan memiliki relevansi kumulatif dengan teori lain di bidangnya, sehingga pengaruh teori tersebut dapat bermanfaat (Strauss et al. Corbin, 2009: 12).

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pendidikan warga negara Menghadapi arus globalisasi dan demokratisasi, pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) di Indonesia dianggap sebagai disiplin ilmu yang mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui

koridor “pendidikan berbasis nilai” (*value-based education*), kecerdikan, karakter). Selain pendidikan berbasis nilai, di era globalisasi, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga mengemban misi pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education for democracy*). Oleh karena itu, menurut Sarbani, (2010:9). Pendidikan Kewarganegaraan harus mempelajari konsep-konsep kunci yang dibawa oleh globalisasi, yaitu: demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum (*rule of law/rule of law*). Semua itu didasarkan pada sebelas pilar demokrasi sebagai sistem negara bermasyarakat, yaitu: 1) Kedaulatan rakyat, 2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah 3) Kekuasaan mayoritas, 4) Hak minoritas, 5) Jaminan hak asasi manusia, 6) Pemilihan umum yang bebas dan adil, 7) Kesetaraan di hadapan rakyat hukum, 8) *Due process of law*, 9) pengekangan konstitusional, 10) pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan 11) nilai-nilai toleran, pragmatisme, kerjasama dan konsensus. Keanekaragaman kearifan mengarah pada pengembangan kapasitas kewarganegaraan (*citizen capacity*) yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan kualitas kewarganegaraan. Oleh karena itu, penguatan jati diri dan karakter Indonesia merupakan ruh dan muatan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di era globalisasi saat ini. Revitalisasi dan reposisi pendidikan kewarganegaraan sebagai “pendidikan berbasis nilai”.

Implementasi model pembelajaran kewarganegaraan global biasanya dapat dilaksanakan baik ketika terjadi interaksi secara langsung dalam pembelajaran guru dan siswa (Bohan et al., 2017). Dalam proses presentasi, para trainer mengevaluasi hasil laporan proyek dan melakukan refleksi terhadap materi dan tugas proyek kewarganegaraan global yang telah diselesaikan. *Model pembelajaran World Citizen Project* sangat cocok untuk pembelajaran. Tugas *Global Citizen Project* diselesaikan berdampak positif pada sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa (Abdul-Rahman et al., 2008). Model pembelajaran ini juga mengembangkan kemampuan siswa untuk mempraktekkan serta berpartisipasi langsung dalam kegiatan aktif sosial, sehingga memperkuat sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa terkait warganegara aktif (Sigauke, 2011). Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyusunan laporan proyek dan publikasi juga meningkatkan pemahaman literasi digital siswa. Menurut Anisimova (2020), dasar-dasar literasi digital mulai berkembang pada usia muda dan seiring bertambahnya usia. Kompetensi digital harus terus berkembang dan beradaptasi dengan dunia digital yang berubah dengan cepat.

Warga global menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Ini sebagai bagian dari analisis tugas *Global Citizen Project*. Menurut Davis dan Miller (1996), model pembelajaran berbasis proyek kelompok efektif dalam mengembangkan metode pembelajaran yang berbeda. Dengan siswa mengidentifikasi masalah dan mengalokasikan waktu untuk mendiskusikan temuan dengan guru untuk menyempurnakan keterampilan dan kemampuan belajar serta meningkatkan inovasi siswa. Kewarganegaraan global melakukannya dengan tujuan agar terdapat tantangan dan hambatan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dibuat alternatif solusi kebijakan agar pelaksanaan tindak lanjut lebih efektif dan dapat dipahami oleh masyarakat melalui

hasil yang dipublikasikan di media sosial. jaringan. Kelima, beberapa postingan di *spreadsheet Global Citizen Project* diposting di media sosial atau melalui YouTube, Facebook, atau Instagram sebagai video. Arsip karya siswa di jejaring sosial dirancang untuk siswa yang bekerja dalam upaya untuk mengatasi isu lokal dan ranah global atau isu yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, kebijakan hukum, sosial budaya, ekonomi dan pendidikan, pendidikan yang dapat dilihat oleh publik dalam format video. sebagai tahap persiapan telah menyediakan spreadsheet proyek kewarganegaraan global.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mendidik kewarganegaraan partisipatif di kancah global. Dalam konteks pendidikan Indonesia, dokumen kewarganegaraan harus lengkap dan mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas keilmuan program PPKn ke arah pendidikan kewarganegaraan global. PKN dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang isu global, kebiasaan global, serta sistem dan institusi internasional. Perubahan program PPKn dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif dan mampu melihat tantangan dan perubahan era globalisasi abad 21 (Murdiono, Suharno & Wuryandani, 2020). Pendidikan politik untuk membangun visi global sangat penting bagi siswa sebagai warga negara muda. Agbaria (2011:61-62) menjelaskan pentingnya pembelajaran global dalam membangun visi global warga negara di era globalisasi. Generasi muda menghadapi tatanan dunia baru. Kontak harian Anda mencakup orang-orang dari berbagai etnis, jenis kelamin, bahasa, ras, dan latar belakang sosial ekonomi. Anda mengalami masalah serius seperti: Kesehatan, ketidakadilan, degradasi lingkungan, kelebihan populasi, migrasi transnasional, nasionalisme etnis, dan kemunduran negara bangsa. Semua anak memiliki hak atas pendidikan, terlepas dari tempat kelahirannya. Namun, anak-anak yang berprestasi di sekolah (lulusan) di abad ke-21 harus memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang kompeten, bertanggung jawab, dan berpengetahuan luas. Pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan agar warga negara muda memiliki pemahaman global. Banks (2008:135) berpendapat bahwa perlu diciptakan konsep baru pendidikan kewarganegaraan di abad 21 agar siswa dapat dididik secara efektif untuk menjadi warga negara yang aktif. Agar transisi berhasil, pengetahuan yang mendasari konsep harus berpindah dari pengetahuan akademis konvensional ke pengetahuan akademis transformatif.

Pengetahuan formal memperkuat pengetahuan tradisional dan ilmu sosial yang mapan, serta sikap dan pengetahuan yang terlembagakan dalam budaya populer kedua aliran tersebut. Pendidikan kewarganegaraan transformasional mengakui dan memperkuat identitas budaya siswa. Ini berakar pada pengetahuan akademik transformatif dan membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menantang ketidaksetaraan dalam masyarakat, bangsa, dan dunia. Selain itu, Anda akan mengembangkan nilai dan perspektif internasional serta sumber daya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat yang demokratis dan multikultural. Ini mendorong pemikiran kritis, yang oleh DeJaeghere disebut pendidikan kewarganegaraan kritis (Banks, 2008: 135).

Di sisi lain, Cogan (1998) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan “kewarganegaraan multidimensi”. Warga negara multidimensi ini memiliki lima atribut utama, yaitu:

“... rasa identitas; menikmati hak-hak tertentu; pelaksanaan kewajibannya masing-masing; tingkat minat dan partisipasi dalam pelayanan publik; dan menerima nilai-nilai dasar sosial”. Dengan kata lain, secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan perlu mengembangkan warga negara dengan lima ciri utama, yaitu: identitas, kebebasan untuk menikmati hak-hak tertentu, pelaksanaan fungsi terkait, tingkat kepentingan dan partisipasi dalam urusan publik, dan kepemilikan nilai-nilai sosial dasar. Ciri-ciri tersebut menuntut upaya pengembangan kurikulum dan pendidikan kewarganegaraan menuju konsep “kecerdasan kontekstual” dalam nuansa lokal, nasional, dan global (Cheng: 1999). Hal ini sesuai dengan teori kecerdasan majemuk Gardner (1983) yang dipandang sebagai pendekatan pembelajaran yang lebih objektif dalam menemukan dan mengembangkan kemampuan setiap siswa berdasarkan potensi atau kecerdasan aslinya sejak muda. Apapun orientasinya, mereka semua fokus pada pengembangan keterampilan kewarganegaraan. Aspek kewarganegaraan meliputi pengetahuan kewarganegaraan, kewarganegaraan, dan kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan mengenai isi atau apa yang perlu diketahui oleh warga negara terwujud dalam bentuk lima pertanyaan penting yang harus ditanyakan secara terus menerus sebagai sumber pengetahuan kewarganegaraan. Kelima pertanyaan tersebut adalah:

1) Bagaimana kehidupan warga negara, politik dan pemerintahan, 2) Apa landasan sistem politik Indonesia, 3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk secara konstitusional dapat mencapai tujuan, nilai dan prinsip demokrasi Indonesia, 4) Bagaimana Indonesia hubungan dengan negara-negara lain di dunia, 5) Bagaimana peran kewarganegaraan dalam demokrasi Indonesia berupa keterampilan intelektual dan keterlibatan terkait. Pemikiran kritis atau keterampilan intelektual sangat penting bagi warga negara yang terinformasi, efektif dan bertanggung jawab. Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi secara kritis dan logis.

Sifat kewarganegaraan menekankan karakteristik publik dan privat yang penting untuk pelestarian dan pengembangan demokrasi berbasis hak. Kewarganegaraan sebagai keterampilan kewarganegaraan berkembang perlahan karena apa yang dipelajari dan dialami di rumah, di sekolah, di masyarakat dan di LSM. Baik warga negara maupun pribadi dapat digambarkan sebagai anggota masyarakat yang mandiri. Mengembangkan tanggung jawab keperdataan pribadi di bidang keuangan negara dengan tetap menghormati harkat dan martabat setiap individu. Berpartisipasi secara efektif dan bijaksana dalam urusan sipil. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat.

Oleh karena itu, selain menekankan pada pengetahuan, nilai dan sikap, pengembangan pendidikan politik juga harus mengedepankan rasa hormat dan empati global, melampaui batas-batas nasional dan internasional. Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan, peneliti tertarik untuk mendalami nilai-nilai fundamental yang harus

dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan guna membangun jembatan menuju visi tersebut. Pengembangan kerangka konseptual filosofis untuk pendidikan kewarganegaraan global merupakan langkah strategis dan mendesak yang meletakkan dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih luas dari perspektif global. Pendidikan kewarganegaraan global sejauh ini menjadi subjek penelitian yang sangat sedikit. Hasil penelitian dari topik tersebut memiliki signifikansi teoretis dan praktis untuk pengembangan pendidikan kewarganegaraan dalam skala global.

KESIMPULAN

Isu global memiliki dampak yang signifikan terhadap jati diri bangsa dan karakter ke-Indonesiaan melalui pendidikan kewarganegaraan. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai dampak tersebut yakni meningkatkan kesadaran lintas budaya: Isu global seperti migrasi, pertukaran budaya dan arus informasi yang cepat memaksa masyarakat Indonesia hidup dalam masyarakat yang semakin multikultural. Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran lintas budaya dan mengajarkan siswa tentang keragaman budaya, agama, bahasa dan tradisi di Indonesia dan di seluruh dunia. Ini berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran akan identitas nasional yang inklusif dan menghormati keragaman.

Selanjutnya yakni memperkuat identitas nasional: Isu-isu global juga dapat menimbulkan tantangan bagi identitas nasional suatu negara. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia, mengajarkan tentang sejarah, budaya, nilai dan simbol Indonesia. Melalui pemahaman jati diri bangsa yang lebih dalam, siswa dapat mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta kemauan untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara. Ketiga dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif: Isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, konflik internasional dan isu kemanusiaan telah menunjukkan bahwa tantangan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks global. Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami hubungan yang kompleks antara Indonesia dan dunia internasional, serta mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab warga dunia dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan. Terakhir yakni terdapat peningkatan keterampilan secara keseluruhan: Di era globalisasi, keterampilan global menjadi semakin penting. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mengembangkan keterampilan seperti pemahaman lintas budaya, kerjasama lintas budaya, pemecahan masalah global, berpikir kritis dan keterampilan komunikasi yang efektif. Ini memberi siswa alat untuk berpartisipasi aktif dalam dunia global, menghadapi perubahan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat internasional. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri bangsa dan karakter ke-Indonesiaan di tengah tantangan dan dinamika isu global. Melalui pendidikan kewarganegaraan yang holistik dan komprehensif, siswa dapat menjadi warga negara yang berwawasan global, memiliki identitas nasional yang kuat, dan siap menghadapi perubahan dan tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbaria, A. K. 2011. "The Social Studies Education Discourse Community on Globalization: Exploring The Agenda of Preparing For The Global Age", dalam *Journal of Studies in International Education*, 15 (1), hlm. 57-74
- Albrow, M. (1996). *The Global Age: State and Society Beyond Modernity*. California: Stanford University Press
- Azra, A. (2001). "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia". Makalah Seminar Nasional II Civic Education di Perguruan Tinggi, Mataram, 22-23 April
- Banks, J. A. (2008). *Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. Educational Researcher*, 37(3), 129-139.
- Bourke, L., Bamber, P., dan Lyons, M. 2012. "Global Citizens: Who Are They?"; dalam *Education, Citizenship and Social Justice*, 7 (2), hlm. 161-174
- Branson, M. (1998). *The Role Civic Education, A Fortcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*.
- Budimansyah, Dasim. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press
- Cogan, J.J. 1998. "Citizenship Education for The 21st Century: Setting The Context", dalam Cogan, J.J dan Derricot, R. (eds.), *Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page Limited. Hlm.
- Davis, B. D. & Miller, T. R. (1996). *Job Preparation for the 21st Century: a Group Project Learning Model to Teach Basic Workplace Skills*. *Journal of Education for Business*, 72(2), 69-73.
- Falk, R. & Steenbergen, B. V. (1994). *The Condition of Citizenship*. New York: Sage Publications
- Indrijati, S., et al. (2016). *Mata Pelajaran Antropologi Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kim, B. J., Kavanaugh, A. L., & Hult, K. M. (2011). *Civic Engagement and Internet Use in Local Governance: Hierarchical Linear Models for Understanding The Role of Local Community Groups*. *Administration & Society*, 44(7), 807-835.
- Kim, B. J., Kavanaugh, A. L., & Hult, K. M. 2011. "Civic Engagement and Internet Use in Local Governance: Hierarchical Linear Models for Understanding The Role of Local Community Groups", dalam *Administration & Society*, 43 (7), hlm. 807-835.
- Lickona, Thomas. (1992). *Educating For Character (How Our Schools Can Be Teach Respect and Responsibility)*. NewYork: Bantam Book.
- Morais, D.B. dan Ogden, A.C. 2011. *Initial Development and Validation of The Global Citizenship Scale, dalam Journal of Studies in International Education*, 15 (5), hlm. 445-446.

- Murdiono, M., Suharno, & Wuryandani, W. (2020). *Global Citizenship Values in the Student's Book of Pancasila and Civic Education. Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, 401(1), 169-175.
- Parker, W.C., Ninomiya, A., dan Cogan, J. 1999. "Educating World Citizens: Toward Multinational Curriculum Development", dalam *American Educational Research Journal*, 36 (2), hlm. 117-145.
- Rasmikayati, E. & Djuwendah, E. (2015). *Dampak Perubahan Iklim terhadap Perilaku dan Pendapatan Petani (The Impact of Climate Change to Farmers' Behavior and Revenue)*. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 22(3), 372-379.
- Sapriya. 2007. *Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Disertasi Prodi IPS Sekolah Pascasarjana UPI*. Bandung : tidak diterbitkan
- Soemantri, M. Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syukri. (2019). *Upaya Penyelesaian Konflik Politik di Indonesia*. *Jurnal Al-Harakah*, 2(2), 33-46
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Titus, C. 1999. *Civic Education untuk Pemahaman Global, dalam Branson, M.S. dkk.* (eds.), *Belajar Civic Education Dari Amerika*, alih bahasa Syafruddin, M.Y. Alimi, & M. N. Khoiron. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation (TAF).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wilson, David N. 2008. *The Future of Comparative and International Education in Globalised World*. E-mail: dnwilson@oise.utoronto.ca
- Winataputra, U.S. (2006). "Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah : Tinjauan Psiko-Pedagogis". Makalah Seminar Pendidikan dan Pembudayaan Nilai-Nilai Dasar Pancasila. Jakarta, 8 Juni 2006.
- Winataputra, U.S. (2006). "Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah : Tinjauan Psiko-Pedagogis". Makalah Seminar Pendidikan dan Pembudayaan Nilai-Nilai Dasar Pancasila. Jakarta, 8 Juni 2006.
- Winataputra.(2001).*Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Ringkasan Desertasi Doktor pada FPS UPI Bandung : tidak diterbitkan.